

## REPRESENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM DIMENSI PRAKTIK KEWACANAAN DALAM SURAT KABAR BERSKALA NASIONAL DAN REGIONAL

Sofi Aulia Rahmania\*, Rustono, Wahyudi Joko Santoso-

Pendidikan Bahasa Indonesia, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima  
Februari 2018  
Disetujui  
Mei 2018  
Dipublikasikan  
Juli 2018

Keywords:  
Human character,  
local wisdom,  
prophetic values.

### ABSTRAK

Media massa dalam pandangan positivisme merupakan media informasi yang selalu memperhatikan aktualisasi dan objektivitas dalam menyampaikan informasi sehingga tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Namun, dalam pandangan kritis, media massa bukanlah saluran yang bebas dan netral termasuk dalam memberitakan kebijakan pendidikan *full day school* dan moratorium ujian nasional. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti ihwalrepresentasi kebijakan pendidikan dalam teks berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif dan pendekatan teoretis, yaitu analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, cakap, studi pustaka, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, kebijakan pendidikan tersebut direpresentasikan secara positif dan negatif. Representasi tersebut ditentukan oleh praktik kewacanaan ketiga media massa tersebut, seperti menolak, mendukung, atau menggiring opini masyarakat seperti yang diinginkan media.

#### Abstract

Mass media in the view of positivism is a medium of information that always pay attention to the actualization and objectivity in conveying information so that there is no element of alignment in it. However, in a critical view, the mass media is not a free and neutral channel including in preaching full day school education policy and national examinations moratorium. This makes the researcher interested to examine the representation of education policy in Kompas Daily, Jawa Pos daily news, and Suara Merdeka Daily news. This research used a methodological approach, namely descriptive qualitative and theoretical approach, as known as the critical discourse analysis of Norman Fairclough mode. Data collection methods used were the method of referring, proficient, literature study, and documentation. Based on data analysis, the education policy was represented positively and negatively. The representation was determined by the practice of three mass media, such as rejecting, supporting, or heralding public opinion as the media wishes.

## PENDAHULUAN

Media massa berperan penting dalam menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Informasi yang disajikan dalam media massa dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Eriyanto (2002:48) yang mengatakan bahwa dalam pandangan kritis, media massa bukanlah saluran yang bebas dan netral.

Media massa menggunakan bahasa dalam menyebarluaskan informasi, memberi hiburan, dan melaksanakan kontrol sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa media massa tidak dapat lepas dari penggunaan bahasa. Menurut Keraf (1997:3), fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, dan sebagai alat untuk mengadakan integrasi serta beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Selain ketiga fungsi tersebut, Keraf juga menyebutkan bahasa sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa bahasa membentuk praktik sosial. Bahasa sebagai pembentuk praktik sosial memiliki arti bahwa bahasa merupakan bagian dari masyarakat, bahasa merupakan proses sosial, dan bahasa merupakan proses pengondisian sosial oleh faktor lain di luar bahasa yang merupakan bagian dari masyarakat.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang ditampilkan dalam media massa merepresentasikan

fenomena/realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, misalnya dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas (kekuasaan), marginalisasi, emansipasi, dan rasisme. Wacana dalam media massa mengonstruksikan makna dari fenomena/realitas sosial. Makna dikonstruksikan dalam bahasa melalui sistem representasi. Proses mengkonstruksi makna tak lepas dari peran ideologi media massa. Ideologi berperan menampilkan pesan dan realitas hasil konstruksi tampak seperti nyata dan benar. Hall (2003) mengungkapkan bahwa realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu kumpulan fakta, tapi merupakan hasil ideologi atau pandangan tertentu. Realitas atau kenyataan yang ditampilkan dalam media massa merupakan kebenaran subjektif.

Padahal selama ini masyarakat memercayai bahwa wacana dalam media massa menampilkan informasi yang akurat, netral, dan terpercaya. Namun, kenyataannya wacana tersebut telah dipengaruhi oleh ideologi pemilik modal/media massa serta relasi pemilik media massa dengan kelompok-kelompok tertentu. Seperti yang diutarakan Eriyanto (2002:48) bahwa media massa bukanlah saluran yang bebas dan netral. Media massa justru dimiliki kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan.

Segala pemberitaan dalam media massa merepresentasikan sebuah makna yang sesuai dengan ideologi media massa tersebut, termasuk pemberitaan mengenai kebijakan pendidikan. Ideologi terlihat pada setiap kata, tata bahasa, dan struktur

teks yang ditampilkan wartawan dalam wacana media. Penelitian ini mengkaji representasi kebijakan pendidikan dalam teks berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Wacana-wacana tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) atau *Critical Discourse Analysis* model Norman Fairclough.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Menurut Winarno, kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah (dalam Munaji dan Barnawi 2011:17). Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa sebuah kebijakan tidak selalu didominasi oleh kepentingan pemerintah, melainkan harus memerhatikan aspirasi aktor-aktor di luar pemerintah, dan sebelumnya harus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya. Adapun kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan suatu keputusan bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut.

Bakry (2010:12) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik karena yang pertama, kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Pendidikan merupakan ilmu praktis, maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga

kebijakan pendidikan adalah penjabaran visi dan misi pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kedua, kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praktis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ketiga, pendidikan milik masyarakat (barang publik) maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan diakomodasi.

Dari berbagai kebijakan yang telah ditampilkan, peneliti fokus pada dua kebijakan pendidikan yang direpresentasikan dalam ketiga media massa tersebut, yaitu mengenai *full day school* dan moratorium Ujian Nasional. Pemilihan dua kebijakan pendidikan tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya dampak yang ditimbulkan atas pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut berimbas langsung pada siswa dan guru sebagai objek kebijakan serta masyarakat dan lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal maupun informal secara tidak langsung. Hal tersebut juga menjadikan berita-berita tentang kebijakan pendidikan semakin menjadi sorotan publik. Namun, tidak semua surat kabar berperan sebagai penengah antara pemerintah dengan masyarakat dalam merepresentasikan berita kebijakan pendidikan. Pemberitaan yang ditampilkan media massa syarat dengan politik. Media massa memiliki keberpihakan atau kecenderungan pada salah satu kubu. Tidak sedikit pula kebijakan pendidikan direpresentasikan

negatif sebagai kebijakan yang tidak memiliki konsep yang jelas. Representasi yang ditampilkan pada tiap-tiap media bertujuan untuk membentuk opini masyarakat agar sesuai dengan pandangan media massa tersebut. Setiap media massa memiliki latar belakang dan ideologi yang berbeda untuk menggiring opini masyarakat

Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengungkap representasi kebijakan pendidikan dalam teks berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang berjudul “*Representasi Kebijakan Pendidikan dalam Teks Berita Harian Kompas, Harian Jawa Pos, dan Harian Suara Merdeka*”.

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan representasi kebijakan pendidikan dalam dimensi praktik kewacanaan dalam teks berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Hasilnya, kebijakan *full day school* direpresentasikan secara negatif oleh ketiga harian tersebut. Sementara itu, *Harian Kompas* dan *Harian Jawa Pos* konsisten menampilkan representasi negatif kebijakan moratorium ujian nasional dengan melakukan praktik kewacanaan menolak dan membentuk opini masyarakat sesuai dengan yang diinginkan media. Adapun kebijakan moratorium ujian nasional dalam teks berita *Harian Suara Merdeka* direpresentasikan secara positif dan negatif dengan melakukan praktik kewacanaan mendukung sekaligus menolak kebijakan tersebut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sementara itu, pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Darma (2014:99) menjelaskan bahwa AWK adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma kritis. Analisis Wacana Kritis melihat pemakaian bahasa tutur dan sosial sebagai praktik sosial.

Fokus penelitian ini mengenai representasi kebijakan pendidikan *full day school* dan moratorium ujian nasional dalam teks berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Penggalan wacana berita yang merepresentasikan kebijakan pendidikan *full day school* dan moratorium ujian nasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wacana berita kebijakan pendidikan dalam surat kabar *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka* dalam rentang penerbitan bulan Agustus sampai Desember 2016. Metode yang digunakan adalah metode simak, cakap, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam metode simak antara lain teknik dasar dan teknik lanjutan. Sudaryanto (2015:203) mengungkapkan bahwa dengan teknik dasar yang berupa teknik sadap, peneliti harus menyadap penggunaan bahasa

seseorang atau beberapa orang tanpa diketahui penuturnya. Sementara itu, teknik lanjutan dalam metode simak yang digunakan ialah teknik simak bebas libat cakap (SBLC). Dalam teknik simak bebas libat cakap, peneliti tidak ikut serta dalam proses menentukan pembentukan dan pemunculan calon data karena calon data yang terbentuk dan muncul merupakan hasil dari peristiwa kebahasaan yang berada di masyarakat.

Seperti halnya metode simak, metode cakap pun memiliki dua teknik, yaitu teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar dalam metode cakap adalah teknik pancing. Dalam teknik pancing, peneliti memberikan pancingan kepada seseorang atau beberapa orang agar berbicara. Kemudian dalam teknik lanjutan terdapat teknik cakap semuka, teknik cakap taksemuka, teknik rekam, dan teknik catat (Sudaryanto 2015:209:210). Metode cakap digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan proses produksi wacana.

Sementara itu, metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari literatur sebagai sumber referensi serta data-data penelitian yang berupa literatur, jurnal ilmiah hasil penelitian, dan buku bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berita-berita mengenai kebijakan pendidikan yang dimuat di *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos* dan *Harian Suara Merdeka*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data selama lima bulan dari *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos*, dan *Harian Suara Merdeka* diperoleh sebanyak 51 wacana pemberitaan yang berkaitan dengan dua kebijakan pendidikan, yaitu *full day school* dan moratorium Ujian Nasional. Perincian data tersebut terdiri atas, 16 wacana pemberitaan dari *Harian Kompas*, 14 wacana pemberitaan dari *Harian Jawa Pos*, dan 21 wacana pemberitaan dari *Harian Suara Merdeka*.

*Harian Kompas* menyajikan 16 wacana berita kebijakan pendidikan yang terdiri atas 1 berita bertema *full day school* dan 15 berita bertema moratorium ujian nasional. Adapun *harian Jawa Pos* menyajikan 14 wacana berita kebijakan pendidikan yang terdiri atas 5 berita bertema *full dayschool* dan 9 berita bertema moratorium ujian nasional. Sementara itu, *harian Suara Merdeka* menyajikan 21 wacana berita kebijakan pendidikan yang terdiri atas 9 berita bertema *full day school* dan 12 berita bertema moratorium ujian nasional.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan penggalan data pada wacana berita tersebut. Berdasarkan hasil deskripsi, peneliti kemudian menginterpretasikan data tersebut, yaitu menafsirkan hasil analisis data pada tahap deskripsidengan menghubungkannya dengan proses produksi.

### Interpretasi

Interpretasi merupakan proses

menafsirkan hasil analisis data pada tahap deskripsi dengan menghubungkannya dengan proses produksi teks. Menurut Fairclough (1989:164), ada empat hal yang menjadi prosedur interpretasi, yaitu (1) konteks situasional dan tipe wacana, (2) konteks intertekstual, (3) tindak tutur, (4) kerangka, naskah dan skemata, dan (5) poin. Konteks situasional dan tipe wacana berkaitan dengan bagaimana peneliti menafsirkan konteks situasi dan menentukan tipe wacana, yaitu isi, subjek, relasi dan koneksi. Konsep intertekstual menggambarkan teks dari perspektif sejarah, yaitu sebuah teks dapat dianalisis dengan mengacu pada teks lain sebagai konteks historisnya. Teks merupakan dialog antara penulis teks, sehingga teks bersifat dialogis.

Selanjutnya, adalah tindak tutur. Fairclough (1989:175) menjelaskan bahwa prosedur interpretasi tindak tutur adalah menggolongkan apa yang dilakukan penulis (wartawan dan media massa) berdasarkan apa yang ditulis, misalnya membuat pernyataan, menjanjikan, mengancam, memperingatkan, bertanya, meminta tolong, memerintah, dan sebagainya. Sementara itu, skemata merujuk pada perilaku sosial atau aktivitas, sedangkan frame dapat dijabarkan sebagai sebuah topik atau pokok persoalan. Naskah menggambarkan subjek-subjek yang terlibat di dalam aktivitas dan hubungan mereka. Naskah menggambarkan bagaimana subjek bertindak dalam aktivitas sosial. Terakhir adalah poin. Poin adalah arti yang disampaikan teks secara implisit. Skemata dan frame juga berperan

dalam menentukan interpretasi poin.

### **Interpretasi Kebijakan Pendidikan pada Teks Berita *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos* dan *Harian Suara Merdeka***

Dalam kurun waktu 5 bulan, *Harian Kompas* hanya menerbitkan satu berita bertema *full dayschool* dengan judul *Sekolah 5 Hari Masih Digodok* yang terbit pada tanggal 9 Agustus 2016. Hal tersebut pasti memiliki alasan. Sebab, kebijakan *full day school* merupakan isu nasional yang banyak diberitakan media massa lainnya, seperti *Harian Jawa Pos* dan *Harian Suara Merdeka*. Sementara itu, *Harian Kompas* merupakan surat kabar nasional yang selalu memberitakan isu-isu nasional.

Berdasarkan hasil studi pustaka, dapat diinterpretasikan bahwa ada historis yang melatarbelakangi *Harian Kompas* menerbitkan satu berita bertema *full day school*. Sebelum kebijakan *full day school* digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Harian Kompas* pernah memiliki masalah dengan salah satu organisasi masyarakat di Indonesia, yaitu Front Pembela Islam (FPI). Pada tanggal 16 Juni 2016, FPI mendatangi Gedung Kompas untuk melakukan audiensi terkait dengan pemberitaan *Harian Kompas* mengenai Perda Syariah dan razia rumah makan di bulan Ramadhan di Serang, Banten yang berujung pada penyitaan makanan di warteg Ibu Saeni. Atas dasar historis itulah, *Harian Kompas* tidak ingin memberitakan lebih dalam ihwal kebijakan *full day school*. Sebab, kebijakan tersebut merupakan pemicu perselisihan dua organisasi

keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. *Harian Kompas* tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Oleh karena itu, *Harian Kompas* lebih memilih diam.

Pemberitaan yang berjudul *Sekolah 5 Hari Masih Digodok* berisi kebijakan yang belum matang/masih dimatangkan, namun Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menghargai usulan tersebut, seperti pada penggalan data berikut..

JAKARTA, KOMPAS— Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **masih mematangkan** gagasan penerapan kegiatan bersekolah lima hari dalam sepekan. (*Kompas*, 9 Agustus 2016, paragraf 1)

**Meski** baru sebatas gagasan, sejauh ini, baik Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla, **menghargai** usulan tersebut.

(*Kompas*, 9 Agustus 2016, paragraf 3)

Melalui kedua penggalan data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin memberitahukan kepada pembaca bahwa kebijakan *full day school* merupakan kebijakan yang masih mentah. Frasa *masih mematangkan* digunakan wartawan untuk memunculkan reaksi penolakan pada diri pembaca terhadap kebijakan *full day school*. Namun, penolakan yang ditimbulkan dikontrol oleh wartawan dengan menampilkan kepedulian Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menanggapi rencana kebijakan *full day school* melalui kata *menghargai*.

Kata *menghargai* memiliki nilai positif yang lebih banyak dari pada kata *mengindahkan* dan *menghormati*. Penggunaan strategi eufimisme yang digunakan wartawan bertujuan untuk menghormati kedudukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Dengan demikian, praktik kewacanaan yang dilakukan oleh *Harian Kompas* adalah menolak pelaksanaan kebijakan *full day school* dan mempengaruhi pembaca untuk menolak kebijakan tersebut. Namun, penolakan *Harian Kompas* tidak ditampilkan secara gamblang. Hal tersebut dikarenakan *Harian Kompas* khawatir akan kembali mendapatkan kecaman dari masyarakat terkait pemberitaannya.

Hal tersebut berbeda ketika *Harian Kompas* menerbitkan berita ihwal moratorium ujian nasional. *Harian Kompas* menerbitkan 15 berita bertema moratorium ujian nasional sejak tanggal 25 November 2016 hingga 22 Desember 2016. Kali ini *Harian Kompas* lebih berani dalam memberitakan kebijakan moratorium ujian nasional dibanding kebijakan *full day school*. Hal tersebut disebabkan karena dampak dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan moratorium ujian nasional tidak sebesar kebijakan *full day school*. Selain itu, tidak terdapat hubungan antara organisasi islam di Indonesia dengan kebijakan moratorium ujian nasional. Sehingga, *Harian Kompas* dengan gencar memberitakan setiap perkembangan kebijakan moratorium ujian nasional.

Pemberitaan bertema kebijakan moratorium ujian nasional pada *Harian Kompas* secara umum memiliki representasi negatif. Representasi negatif

tersebut ditampilkan wartawan seperti pada penggalan data berikut.

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional **menuaikritik**. Pasalnya, UN terlanjur menjadi mekanisme untuk mematok standar pendidikan secara nasional. Di samping itu, dalam dua tahun terakhir, UN memang tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan. (*Kompas*, 28 November 2016, paragraf 1)

Kata *menuai* memiliki persamaan makna dengan kata *mendapatkan*. Metafora *menuai* mewakili sebuah keadaan pemerintah yang menanggung akibat dari perbuatannya, yaitu merencanakan moratorium ujian nasional. Sementara itu, kata *kritik* berarti kecaman atau tanggapan yang terkadang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk mengenai suatu hal. Penggunaan kata *kritik* dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin membentuk opini masyarakat bahwa kebijakan moratorium ujian nasional merupakan kebijakan yang tidak baik (tipe wacana). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa praktik kewacanaan *Harian Kompas* adalah mempengaruhi pembaca agar menolak kebijakan moratorium ujian nasional.

JAKARTA, KOMPAS – Rencana pemerintah meninjau kembali pelaksanaan dan fungsi Ujian Nasional

**perlu** dikaji secara cermat. Pasalnya, aturan-aturan mengenai hakikat dan tujuan pelaksanaan Ujian Nasional selama ini belum sinkron antara satu dengan yang lain. (*Kompas*, 28 November 2016, paragraf 1)

Penggalan data tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu mengkaji kembali pelaksanaan dan fungsi ujian nasional. Kata *perlu* merupakan modalitas epistemik kadar keharusan. Kata *perlu* pada penggalan data tersebut mewakili sebuah tindakan yang harus segera dilakukan karena berkaitan dengan hal penting. Penggunaan kata *perlu* pada penggalan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa wartawan melarang pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali pelaksanaan dan fungsi ujian nasional (tipe wacana). Wartawan menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang sia-sia karena selama ini aturan-aturan terkait hakikat dan tujuan pelaksanaan ujian nasional belum sinkron. Padahal, pada penggalan data sebelumnya, wartawan menampilkan kebijakan moratorium ujian nasional merupakan kebijakan yang tidak baik untuk dilaksanakan. Wartawan ingin menunjukkan apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebuah kesalahan, yaitu merencanakan kebijakan moratorium ujian nasional dan mengkaji ulang pelaksanaan dan fungsi ujian nasional. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin meyakinkan pembaca bahwa jalan keluar satu-satunya adalah tetap melaksanakan ujian nasional.

*Harian Kompas* tetap menampilkan

representasi negatif ihwal kebijakan moratorium ujian nasional meskipun pemerintah sudah membatalkan kebijakan tersebut, seperti pada penggalan data berikut.

JAKARTA, KOMPAS - Batalnya moratorium ujian nasional dapat dimaklumi pemangku kepentingan mengingat ide moratorium itu sendiri mendadak muncul di tengah sekolah mempersiapkan siswanya menyambut Ujian Nasional 2017. Ujian dijadwalkan April-Mei sehingga ide itu dianggap **tidak realistis**. (*Kompas*, 9 Desember 2016, paragraf 1)

Penggalan data tersebut memberitakan bahwa pemerintah telah membatalkan kebijakan moratorium ujian nasional. Wartawan sengaja membuat pernyataan bahwa kebijakan moratorium ujian nasional tidak realistis. Frasa *tidak realistis* secara ideologis memiliki nilai rasa negatif. Frasa tersebut digunakan wartawan untuk menggiring opini pembaca bahwa ketidakrealistisan kebijakan moratorium ujian nasional disebabkan kurangnya kajian sebelum Mendikbud mengumumkan kebijakan tersebut. Poinnya adalah keputusan pemerintah terkait pembatalan kebijakan moratorium ujian nasional merupakan keputusan yang baik.

Dengan demikian, praktik kewacanaan yang dilakukan *Harian Kompas* adalah menolak pelaksanaan kebijakan moratorium ujian nasional dan sengaja membentuk opini masyarakat

bahwa Mendikbud bertindak gegabah karena mengumumkan kebijakan tanpa ada kajian terlebih dahulu. Bukan tanpa alasan *Harian Kompas* melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil studi pustaka, *Harian Kompas* memiliki beberapa usaha yang tergabung dalam *Kompas Gramedia Group* (KGG). *Kompas Gramedia Group* memiliki toko buku Gramedia yang tersebar lebih dari 100 kota di Indonesia. *Kompas Gramedia Group* juga memiliki percetakan di beberapa kota besar, seperti Makasar, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Banjarmasin, dan Bali. KGG juga mempunyai PT Gramedia Pustaka Utama yang khusus menerbitkan buku-buku umum, seperti fiksi dan Elex Media Komputindo yang menerbitkan buku-buku elektronik dan komik. Selain itu, *Kompas Gramedia Group* juga memiliki usaha khusus untuk menerbitkan buku-buku ajar pendidikan dasar dan menengah sejak tahun 1990, yaitu PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), dan masih banyak lagi usaha yang tergabung dalam *Kompas Gramedia Group*.

Jika kebijakan moratorium ujian nasional disetujui oleh pemerintah, maka beberapa usaha yang tergabung dalam *Kompas Gramedia Group* akan macet. Sumber pendapatan *Kompas Gramedia Group* pasti akan berkurang banyak di beberapa anak perusahaan, seperti perusahaan percetakan, penerbit buku-buku ajar PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), dan toko buku Gramedia. Hal itu dikarenakan siswa tidak akan membutuhkan buku-buku ringkasan materi, buku-buku latihan soal maupun

buku yang memuat prediksi-prediksi soal ujian nasional.

*Harian Kompas* selalu menampilkan representasi negatif pada pemberitaan bertema kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Namun dalam merepresentasikan kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional, *Harian Kompas* beberapa kali menggunakan strategi eufimisme. Berbeda dengan *Harian Kompas*, *Harian Jawa Pos* lebih lugas dalam merepresentasikan kebijakan *full dayschool* dan moratorium ujian nasional beserta penggagasnya, seperti pada penggalan data (6) berikut.

Gagasan itu membuat **banyak pihak khawatir. Akan banyak permasalahan** karena infrastruktur belum siap. Meski, Muhadjir mengklaim sudah mendapat restu dari presiden dan wakil presiden untuk menerapkan sistem sekolah sehari penuh tersebut mulai jenjang sekolah dasar (SD). (*Jawa Pos*, 9 Agustus 2016, paragraf 2)

Frasa *banyak pihak khawatir* dan *banyak permasalahan* menunjukkan bahwa kebijakan *full day school* membawa dampak yang buruk jika tetap dilaksanakan. Penggunaan frasa *banyak pihak khawatir* dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin membentuk opini masyarakat bahwa kebijakan *full day school* merupakan kebijakan yang buruk karena tidak didasarkan pada kajian

yang matang, sedangkan penggunaan frasa *banyak permasalahan* yang dikombinasikan dengan modalitas akan dapat diinterpretasikan bahwa wartawan memperingatkan bahkan mengancam pemerintah akibat pelaksanaan kebijakan *full day school*. Penggalan data tersebut juga dapat menggambarkan sikap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sebagai penggagas kebijakan *full day school*. Muhadjir Effendy digambarkan sebagai menteri yang ceroboh, karena melaksanakan sebuah kebijakan ditengah ketidaksiapan infrastruktur.

Selanjutnya, *Harian Jawa Pos* masih konsisten menampilkan representasi negatif pada pemberitaan bertema kebijakan *full day school*. Pada penggalan data ini wartawan menggunakan kata *risau* untuk mewakili keadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setelah Muhadjir mengumumkan akan memberlakukan kebijakan *full day school*, seperti pada penggalan data berikut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) **tidak kalah risau** dengan rencana *full day school*. (*Jawa Pos*, 10 Agustus 2016, paragraf 7)

Kata *risau* memiliki pengertian gelisah dan khawatir. Penggunaan frasa *tidak kalah* sebelum kata *risau* dapat diinterpretasikan bahwa kegelisahan dan kekhawatiran yang melanda KPAI merupakan kegelisahan yang besar. Jika KPAI merasa gelisah dan khawatir terhadap rencana *full day school*, pasti ada hal buruk dalam *full day school* yang akan berpengaruh pada anak. Tentunya pengaruh negatif akibat pelaksanaan kebijakan *full*

*day school*, seperti berpengaruh pada tumbuh kembang anak atau pada perilaku sosial anak. Pengaruh negatif tersebut juga dapat disebabkan oleh konsep dan teknis pelaksanaan yang belum jelas. KPAI khawatir anak-anak Indonesia hanya dijadikan kelinci percobaan untuk kebijakan yang tidak jelas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin mempengaruhi pembaca agar menolak kebijakan *full day school*.

Jika pada penggalan data sebelumnya *Harian Jawa Pos* hanya mengkritik kebijakannya saja, pada penggalan data ini *Harian Jawa Pos* juga mengkritik tokoh politik yang terlibat di dalamnya, seperti pada kutipan berikut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus **segera turun tangan**. Kontroversi terkait gagasan *full day school* bisa **semakin runcing**. Kemarin (10/8) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) **mendorong** sistem itu **segera diujicobakan**. Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani **meminta** wacana tersebut **dibatalkan**. (*Jawa Pos*, 11 Agustus 2016, paragraf 1)

Penggalan data tersebut menggambarkan bahwa Presiden Joko Widodo diharapkan untuk cepat angkat bicara dan bertindak terkait perdebatan gagasan *full day school* yang semakin panas, khususnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Puan Maharani. Dalam penggalan data tersebut,

Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat sangat mendukung rencana *full day school* yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan Jusuf Kalla juga menginginkan kebijakan tersebut segera diujicobakan, tanpa memikirkan konsep dan teknik pelaksanaan serta sarana prasarana yang tidak memadai. Namun, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meminta gagasan *full day school* untuk tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan sengaja menampilkan sikap Presiden yang kurang sigap dalam menanggapi perdebatan kebijakan *full day school*. Wartawan juga menampilkan sikap Wapres Jusuf Kalla yang gegabah dalam mengambil keputusan. Sebab, semua orang, termasuk Jusuf Kalla pun mengetahui bahwa kebijakan *full day school* belum matang tetapi justru didukung untuk segera diujicobakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik kewacanaan *Harian Jawa Pos* adalah menolak pelaksanaan kebijakan *full day school*. Selain itu, *Harian Jawa Pos* sengaja membentuk opini pembaca bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa bertindak cepat disaat situasi sedang genting serta Wapres Jusuf Kalla yang gegabah dan terkesan memaksakan pendapat. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan rasa simpatik masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden sehingga dapat menurunkan elektabilitas (tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan) Presiden Joko Widodo pada pemilu selanjutnya.

Representasi negatif yang ditampilkan *Harian Jawa Pos* di setiap pemberitaan bertema *full day school* tidaklah tanpa alasan. Pada pemilu 2014, Dahlan Iskan yang merupakan pemilik Jawa Pos Grup mendukung pasangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, hal tersebut berbanding terbalik setelah Dahlan Iskan terlibat perseteruan dengan Surya Paloh yang merupakan sahabat dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejak kejadian tersebut, hubungan Dahlan Iskan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi buruk.

Apalagi setelah beberapa kasus yang menyerang Dahlan Iskan seolah tampak tidak wajar. Dahlan Iskan beberapa kali diperiksa oleh kejaksaan tinggi atas beberapa kasus yang menimpanya. Pada sebuah media massa online (*detik.com*) Dahlan Iskan mengaku sedang diincar oleh yang berkuasa. Walaupun Dahlan tidak menyebutkan secara rinci orang yang berkuasa tersebut, beberapa pemberitaan dan secara historis mengarah pada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Oleh sebab itu, pada kebijakan pendidikan selanjutnya, yaitu moratorium ujian nasional, *Harian Jawa Pos* selalu menyerang Wakil Presiden Jusuf Kalla di setiap pemberitaannya, seperti pada penggalan data berikut.

Sejak 2003, pelaksanaan ujian nasional (unas) **berkali-kali** mengalami proses **tarik ulur**. Ada indikasi kuat bahwa **unas tidak murni soal pendidikan**. Berikut ringkasan sejarah dan kontroversi kebijakan unas. (*Jawa Pos*, 3 Desember 2016, paragraf 1)

Penggunaan kata ulang *berkali-kali* dan frasa *tarik ulur* menunjukkan bahwa perdebatan ihwal pelaksanaan ujian nasional sudah sering terjadi sejak 14 tahun yang lalu. Analisis tersebut semakin menguatkan interpretasi bahwa pemerintah lamban dalam memutuskan sebuah permasalahan. Pada kalimat pertama wartawan ingin menunjukkan fakta yang memberikan efek mengejutkan bagi pembaca karena 14 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah perdebatan kebijakan. Klausula *unas tidak murni soal pendidikan* sengaja ditampilkan wartawan untuk menimbulkan kecurigaan dan rasa ingin tahu dalam diri pembaca bahwa ada sesuatu dibalik kebijakan ujian nasional. Klausula tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa ada kepentingan politik yang melatarbelakangi pelaksanaan ujian nasional. Dengan demikian, wartawan ingin agar pembaca akan terus membaca pemberitaan di surat kabar tersebut atau mencari jawaban atas keingintahuannya.

Berkaitan dengan kepentingan politik yang melatarbelakangi pelaksanaan ujian nasional, wartawan menampilkan fakta lain yang menguatkan interpretasi penggalan data sebelumnya. Berikut interpretasi dan hasil analisis data.

Diakui atau tidak, sejak satu dekade lalu, argumen pedagogis-akademis dari **pihak-pihak yang mempertahankan unas** sebagai (salah satu) penentu kelulusan sebenarnya telah mengalami kebangkrutan. Hanya **kuasa politiklah** yang

membuat kebijakan tersebut tetap dipertahankan. (*Jawa Pos*, 3 Desember 2016, paragraf 7)

Klausa *pihak-pihak yang mempertahankan unas* dapat mengacu pada perseorangan maupun pada kelompok politik tertentu sedangkan frasa *kuasa politik* menggambarkan kekuasaan yang dimiliki dan digunakan untuk urusan dan kepentingan politik. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa orang-orang yang mendukung ujian nasional sudah kalah sejak dulu dengan adanya putusan Mahkamah Agung pada tahun 2008 yang memberhentikan pelaksanaan ujian nasional. Namun, orang yang memiliki kekuasaanlah yang dapat membuat ujian nasional tetap dilaksanakan. Penggalan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa wartawan sengaja membuat pembaca semakin ingin tahu siapakah orang dibalik ujian nasional dan apa alasannya tetap melanggengkan ujian nasional sampai saat ini.

Pertanyaan pembaca terjawab ketika *Harian Jawa Pos* menerbitkan berita berjudul *Istana Tolak Moratorium Unas* pada tanggal 8 Desember 2016. Berikut penggalan data tersebut.

Terlepas dari siapa pengambil kebijakan dalam forum rapat di istana, Retno mengatakan tidak kaget jika JK menyampaikan unas tetap dilanjutkan. Sebab, kata Retno, **JK adalah salah seorang yang membidani lahirnya unas.** (*Jawa Pos*, 8 Desember 2016, paragraf 9)

Metafora *membidani lahirnya unas* memiliki pengertian mencetuskan gagasan atau memelopori gagasan ujian nasional. Klausa *JK adalah salah seorang yang membidani lahirnya unas* yang ditampilkan wartawan pada kutipan tidak langsung Retno merupakan jawaban atas pertanyaan pembaca yang ditimbulkan pada penggalan data sebelumnya. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa orang yang memiliki kekuasaan yang dimaksud pada penggalan data sebelumnya adalah Jusuf Kalla sebab pada tahun 2008, saat Mahkamah Agung memutuskan untuk memberhentikan ujian nasional, Jusuf Kalla masih menjabat sebagai wakil presiden di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun di tahun 2003, ketika ujian nasional pertama kali diperdebatkan, Jusuf Kalla menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Dengan demikian, praktik kewacanaan yang dilakukan *Harian Jawa Pos* adalah mendukung pelaksanaan moratorium ujian nasional serta menunjukkan identitas Jusuf Kalla yang sebenarnya kepada masyarakat. Jusuf Kalla sengaja ditampilkan sebagai orang yang licik karena melahirkan ujian nasional berdasarkan kepentingan politik, bukan karena kepentingan pendidikan. Hal tersebut bertujuan agar pembaca memiliki penilaian negatif pada Jusuf Kalla.

Berbeda dengan *Harian Kompas* yang hanya menerbitkan satu berita bertema *full day school*, *Harian Suara Merdeka* menerbitkan 9 berita bertema

*full day school* sejak tanggal 9 Agustus hingga 20 September 2016. Jika *Harian Kompas* takut memberitakan kebijakan *full day school* karena kebijakan tersebut memicu pertentangan dua organisasi Islam di Indonesia, lain halnya dengan *Harian Suara Merdeka* yang justru menjadikan isu tersebut sebagai bahan pemberitaannya. *Harian Suara Merdeka* melihat kebijakan *full day school* mengalami penolakan besar di masyarakat. Penolakan tersebut kemudian disampaikan *Harian Suara Merdeka* yang mewakili kepentingan khalayak. Oleh sebab itu, hampir semua pemberitaan ihwal kebijakan *full day school* mengarah pada kritik (mengkritisi). Berikut penggalan data yang memiliki representasi negatif.

Meski masih wacana, usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang *full day school* atau sekolah sehari penuh untuk SD-SMP dinilai **sembrono**. Sistem pendidikan sehari penuh **tidak efektif**. Selain itu, banyak faktor pendukung yang belum siap. (*SM*, 10 Agustus 2016, paragraf 1)

Penggunaan kata *sembrono* pada penggalan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang mengumumkan akan memberlakukan kebijakan *full day school* merupakan tindakan yang ceroboh dan asal bicara. Kecerobohan tersebut dikarenakan Muhadjir tidak mengkaji *full day school* dengan pakar-pakar pendidikan sebelum diumumkan. Padahal *full day school* dinilai

tidak efektif karena faktor pendukung, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (guru) yang belum siap. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin membentuk opini masyarakat bahwa kebijakan *full day school* merupakan kebijakan coba-coba, serta mempengaruhi masyarakat agar menolak kebijakan tersebut

*Harian Suara Merdeka* juga mengangkat isu kebijakan *full day school* yang dapat mematikan pendidikan agama sore yang disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jawa Tengah, Muh Zen berikut.

Penerapan sekolah sehari penuh juga **akan mematikan pendidikan keagamaan** sore, seperti taman pendidikan Alquran. Hal ini menjadi alasan penolakan ketiga. (*SM*, 10 Agustus 2016, paragraf 7)

Data (17) memberikan gambaran ihwal dampak atau akibat pelaksanaan *full day school* yang mengganggu pelaksanaan pendidikan keagamaan di sore hari. Adapun kata yang menonjol yaitu *mematikan*. Sebenarnya wartawan dapat mengganti kata *mematikan* untuk mengurangi penilaian negatif pembaca, seperti kata *menghentikan* dan *mengganggu*. Kata *mematikan* memiliki pengertian membunuh dan menyebabkan mati. Secara metaforis, kata *mematikan* mewakili sebuah situasi politik dan sosial di mana sebuah kebijakan menghentikan produktivitas sebuah lembaga pendidikan informal.

Meskipun tidak ada kosakata yang secara ideologis tidak sesuai dengan etika penulisan, alasan-alasan Zen yang sengaja ditampilkan wartawan akan membentuk opini masyarakat bahwa kebijakan *full day school* memicu perselisihan dua organisasi Islam di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Pendidikan agama sore atau yang biasa disebut Taman Pendidikan Quran (TPQ) merupakan sekolah di bawah naungan NU. Sementara itu, latar belakang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy berasal dari Muhammadiyah.

Alasan Muh Zen tersebut kemudian dijawab oleh Muhadjir pada berita yang diterbitkan keesokan harinya, yaitu tanggal 11 Agustus 2016 dengan judul *Muhadjir Ingin Ada Kajian, Puan Minta Dibatalkan*. Berikut peggalan data tersebut.

*“Full day school ini bukan seperti yang dibayangkan. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan lewat pelajaran saja. Ada yang bilang, full day school bisa mematikan TPA dan TPQ, justru anak yang sudah ikut TPA bisa disinergikan dengan kegiatan sekolah. Jadi siswa tidak harus berada di sekolah, tapi berada dalam tanggung jawab sekolah,”* tegas Mendikbud. (SM, 11 Agustus 2016, paragraf 12)

Dalam kutipan tersebut, kata-kata yang diucapkan Muhadjir memiliki konteks ideologi dengan maksud menjaring dukungan dan meyakinkan pembaca untuk tidak meragukan program *full day school*.

Jawaban Muhadjir terkait pernyataan Muh Zen pada pemberitaan sebelumnya terdapat pada kalimat ketiga. Namun, bukan semakin jelas, justru dengan kutipan tersebut Muhadjir Effendy terlihat tidak paham dengan kebijakan yang digagasnya. Seperti yang disebutkan pada kalimat empat, yaitu *Jadi siswa tidak harus berada di sekolah, tapi berada dalam tanggung jawab sekolah*. Sebuah sekolah tidak akan mau dan setuju diberi tanggung jawab menjaga siswa, sementara siswa tersebut tidak berada di sekolah tersebut, tetapi berada di tempat lain. Dengan demikian, praktik kewacanaan *Harian Suara Merdeka* adalah menolak kebijakan *full day school* dan menurunkan kepercayaan dan simpatik masyarakat terhadap Mendikbud, Muhadjir Effendy.

Berbeda dengan pemberitaan sebelumnya. *Harian Suara Merdeka* konsisten menampilkan representasi negatif kebijakan *full day school* dan menolak kebijakan tersebut. Namun, pada pemberitaan bertema moratorium ujian nasional, *Harian Suara Merdeka* tidak konsisten dalam merepresentasikan kebijakan tersebut. Praktik kewacanaan *Harian Suara Merdeka* adalah menolak kebijakan moratorium ujian nasional. Namun, sebagian lainnya mendukung kebijakan tersebut dengan cara menyayangkan sikap pemerintah yang menolak kebijakan moratorium ujian nasional. Representasi negatif pada pemberitaan bertema kebijakan moratorium ujian nasional ditampilkan wartawan pada kebijakan berikut.

PATI - Rencana penghentian sementara (moratorium) ujian nasional (UN) menuai **polemik**. Langkah yang diambil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu dinilai sebagai **kebijakan sepihak**. (SM, 3 Desember 2016, paragraf 1)

Kata *polemik* pada data (51) memiliki pengertian adanya perdebatan ihwal kebijakan moratorium ujian nasional yang dikemukakan secara terbuka di media massa. Semua orang berhak berpendapat dan memberi tanggapan terhadap kebijakan moratorium ujian nasional di media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik sehingga perdebatan tidak terelakkan. Frasa *kebijakan sepihak* mengindikasikan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tidak mendiskusikan terlebih dahulu rencana moratorium ujian nasional tersebut sebelum mengumumkannya.

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin membentuk opini publik ihwal kebijakan moratorium ujian nasional sebagai kebijakan yang asal-asalan karena tidak melalui tahap pengkajian oleh pakar-pakar pendidikan. Wartawan juga ingin menyampaikan pada pembaca mengenai sikap Muhadjir yang ceroboh karena mengeluarkan kebijakan tanpa melalui proses pengkajian terlebih dahulu. Dengan kata lain, wartawan tidak setuju dengan adanya moratorium ujian nasional.

Namun, pada penggalan data lain, wartawan menampilkan sikap kecewa karena moratorium ujian nasional ditolak

oleh Jusuf Kalla. Berikut penggalan data tersebut.

JAKARTA - Sejumlah pakar dan praktisi pendidikan **menyayangkan** sikap pemerintah, khususnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang tidak menyetujui moratorium (penghentian sementara) ujian nasional (UN). (SM, 9 Desember 2016, paragraf 1)

Berdasarkan penggalan data tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa wartawan kecewa atas penolakan pemerintah terhadap moratorium ujian nasional dengan mengatasnamakan sejumlah pakar dan praktisi pendidikan. Kekecewaan tersebut ditampilkan wartawan melalui kata *menyayangkan*. Kata *menyayangkan* memiliki pengertian menyesalkan suatu hal yang telah terjadi. Wartawan ingin pembaca menyalahkan Jusuf Kalla atas penolakan terhadap kebijakan moratorium ujian nasional dan ikut mendukung kebijakan moratorium ujian nasional. Kekecewaan terhadap penolakan moratorium ujian nasional juga dirasakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy karena keputusan menolak moratorium ujian nasional penuh dengan pertimbangan politik, seperti pada penggalan data berikut.

Keputusan tersebut, diakuinya **penuh** dengan **pertimbangan politis**. "Keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan UN **penuh pertimbangan politis**, namun apa yang sudah diputuskan oleh Presiden

Joko Widodo merupakan sesuatu yang bijak,” imbuhnya (Mendikbud). (SM, 23 Desember 2016, paragraf 10)

Repetisi frasa *pertimbangan politis* yang dikombinasikan dengan kata *penuh* digunakan untuk memberikan penekanan informasi bahwa dalam proses pengambilan keputusan moratorium ujian nasional memang dipengaruhi oleh kepentingan politik. Penggalan data tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa wartawan ingin pembaca beranggapan bahwa pemerintah tidak pernah serius menangani masalah pendidikan. Semua masalah pasti dikaitkan dengan kepentingan politik. Penggalan data tersebut sengaja ditampilkan oleh wartawan agar dalam diri pembaca mulai tumbuh ketidakpercayaan pada pemerintah.

Perbedaan representasi pemberitaan bertema kebijakan *full day school* dan kebijakan moratorium ujian nasional dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah untuk kepentingan bisnis. Segala kebijakan redaksional atau internal *Harian Suara Merdeka* harus mempertimbangkan aspek bisnis.

## PENUTUP

Analisis praktik kewacanaan (*discourse practice*) fokus pada menafsirkan hasil analisis data pada tahap deskripsi dan menghubungkannya dengan proses produksi teks. Sebagian besar surat kabar memberitakan ihwal kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional, termasuk *Harian Kompas*, *Harian Jawa*

*Pos*, dan *Harian Suara Merdeka*. Proses produksi wacana berita pada ketiga surat kabar tersebut berhubungan erat dengan ideologi wartawan dan media massa yang menaunginya. *Harian Kompas* hanya menerbitkan satu berita ihwal kebijakan *full day school* dan 15 berita ihwal kebijakan moratorium ujian nasional. Padahal perdebatan kebijakan *full day school* merupakan isu nasional yang sewajarnya lebih banyak diberitakan oleh harian berskala nasional, seperti *Harian Kompas*. Meskipun demikian, *Harian Kompas* konsisten dalam menampilkan representasi negatif pada kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional. Dengan demikian, selain menolak kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional, praktik kewacanaan yang dilakukan *Harian Kompas* adalah menggiring opini masyarakat bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang belum dikaji sehingga diharapkan masyarakat pun menolak kedua kebijakan tersebut.

Sementara itu, *Harian Jawa Pos* juga konsisten dalam merepresentasikan kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional. Kedua kebijakan tersebut selalu direpresentasikan negatif oleh *Harian Jawa Pos* meskipun fokus perdebatan pada pemberitaan tersebut berbeda. Praktik kewacanaan *Harian Jawa Pos* adalah menampilkan identitas sosial yang buruk pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tujuan menurunkan bahkan menghilangkan simpati masyarakat terhadap kedua tokoh tersebut. Berbeda

dengan *Harian Kompas* dan *Harian Jawa Pos*, *Harian Suara Merdeka* tidak konsisten dalam memberitakan kebijakan *full day school* dan moratorium ujian nasional. Kebijakan *full day school* direpresentasikan negatif, sedangkan kebijakan moratorium ujian nasional direpresentasikan positif dan negatif. Hal tersebut dikarenakan Praktik kewacanaan *Harian Suara Merdeka* adalah memberitakan segala kepentingan masyarakat dan peristiwa yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Aminuddin. 2010. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Medtek. Vol 2. Nomor 1.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- Hall, Stuart. 1997. *The Work of Representation (Representation: Cultural Representation and Signifying Practice)*. London: Sage Publication.
- Keraf, Gorys. 1997. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press